

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Abdurahman H, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Arba. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika ,2019.
- Arie Sukanti Hutagalung, *Pergulatan Pemikiran dan Aneka Gagasan Seputar Hukum Tanah Nasional*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2011).
- Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Benhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djembatan, Jakarta, 2007.
- H. Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Prespektif Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 2004,
- Ilham, *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990.
- Irwan Soejito, *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Rineka Cipta, Bandung, 1990.
- Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung, 2008.
- Maria S.W. Soemardjono. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi. Edisi Revisi*. Jakarta: Kompas. 2006.
- , *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta, 2001.
- Mochtar Koesoemaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- , *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Mudakir Iskandar Syah. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jakarta: Jala Permata Aksara., 2019.

- Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Pencabutan Hak Pembebasan Dan Pengadaan Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- RDH Koesoemaatmaja, *Pengantar Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1997.
- Salindeho, John. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1987.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

## B. Sumber Lain

### 1) Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar dan Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021

### 2) Karya Tulis

- Adang Jukardi, *Warga Belum Terima Ganti Rugi Tol Cisumdawu BPN Bantah Banyak Masalah Pada Pembebasan Lahan*, dalam *Harian PikiranRakyat.com*, Jawa Barat, diakses pada Kamis 11 Juni 2020.
- Edi Rohaedi dan Nadia Zumaro, *Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal artikel; Unpak Journal; 2009, Volume 2.
- Juosfiel Sadpri Pansariang, *Proses Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia*; Jurnal artikel; UAJY Journal; 2014. *Lex Privatum* Volume II.

- Rahayu Subekti, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal artikel; UNS Journal; 2016. Volume II
- Tine Suartina. 2008. “*Analisis Hukum pada Kebijakan Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum di Indonesia*”. Jurnal Masyarakat & Budaya. Volume 10. No. 1.
- Urip Santoso, ”*Perolehan Tanah Oleh Pemerintah Daerah Yang Berasal Dari Tanah Hak Milik.*” Jurnal Perspektif,. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga , Januari 2015, Vol. XX No. .
- Urip Santoso, *Eksistensi Berlakunya Pencabutan Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012*, Jurnal Media Publication Artikel; Volume 22 No. 1 Tahun 2017 Edisi Januari
- Widyarini, I.W. 2007. “*Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*”. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol. 4. No. 2. April.